JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 11596-11607
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

MERAJUT DIALOG PARTISIPATIF SEBAGAI DEKONSTRUKSI BEBAN ADMINISTRATIF DEMI MEMBANGUN MUTU PENDIDIKAN

Aprilia Sofiana Umy Wahed[1], Achmad Muhlis[2]
[1,2] Universitas Islam Negeri Madura, Indonesia

Email: apriliasofiana04@gmail.com

Check for updates OPEN ACCESS CC BY SA

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3700

Sections Info

Article history:
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 30 October 2026

Keywords:
Participatory Dialogue, Administrative Burden, Collaborative Governance, Educational Quality, Bureaucratic Deconstruction.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of a participatory dialogue model as a strategy for deconstructing administrative burden in order to accelerate the quality of education effectively, efficiently, and sustainably. A qualitative approach with a library research design was employed. Secondary data were drawn from reputable scientific articles, academic books, and policy documents, and were analyzed using content analysis. The findings indicate that rigid, top-down reporting bureaucracy is the main trigger of teacher burnout and shifts educators' focus away from the substance of learning. Through dialogical communication and collaborative governance, participatory dialogue proves effective in breaking down hierarchical barriers, eliminating redundant reporting items, and fostering a sense of belonging among educators. The novelty of this study lies in the proposed "Participatory Deconstruction" framework, an integrative model that combines Freirean communication principles with modern governance. This framework transforms burdensome bureaucratic reporting formats into an empowerment instrument directly oriented toward sustainable improvement of learning quality. These findings are expected to serve as a practical reference for policymakers and schools in designing reporting systems that are lighter, more meaningful, and supportive of student learning processes.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan model dialog partisipatif sebagai strategi dekonstruksi beban administratif untuk mengakselerasi mutu pendidikan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, dan dokumen kebijakan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa birokrasi pelaporan yang kaku dan bersifat satu arah (top-down) menjadi pemicu utama kelelahan kerja (burnout) serta menggeser fokus pendidik dari substansi pembelajaran. Melalui komunikasi dialogis dan tata kelola kolaboratif, dialog partisipatif terbukti efektif meruntuhkan sekat hierarki, memangkas pos pelaporan yang redundan, serta menumbuhkan rasa kepemilikan bersama* (sense of belonging) *di kalangan pendidik. Kebaruan penelitian ini terletak pada penawaran kerangka "Dekonstruksi Partisipatif", yaitu model integratif yang memadukan prinsip komunikasi Freirean dengan tata kelola modern. Kerangka ini mentransformasikan format pelaporan birokratis yang memberatkan menjadi instrumen pemberdayaan yang berorientasi langsung pada peningkatan kualitas pembelajaran berkelanjutan. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan praktis bagi pemangku kebijakan dan satuan pendidikan dalam menyusun sistem pelaporan yang lebih ringan, bermakna, dan berpihak pada proses pembelajaran peserta didik.*

Kata kunci: *Dialog Partisipatif, Beban Administratif, Tata Kelola Kolaboratif, Mutu Pendidikan, Dekonstruksi Birokrasi.*

PENDAHULUAN

Mutu pendidikan nasional sangat bergantung pada efektivitas kerja pendidik di satuan pendidikan. Namun, energi utama guru sering tereduksi oleh urusan birokrasi dan pelaporan administratif yang kaku. Mutu pendidikan nasional memberikan pedoman penting agar lembaga pendidikan dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif dan berkualitas tinggi serta memastikan standar yang seragam di seluruh negeri (Asrohah, 2024). Efektivitas ini hanya tercapai bila guru memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk fokus pada proses pembelajaran, yang merupakan inti dari layanan pendidikan (OECD, 2019).

Pasal 31 Ayat 3 UUD 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 (Republik Indonesia, 1945). Pada praktiknya, pengelolaan pendidikan cenderung terjebak pada *administrative compliance* (kepatuhan administratif) ketimbang substansi pembelajaran. Budaya birokratis memberikan stabilitas dan konsistensi, yang penting untuk kepatuhan terhadap regulasi dalam sistem pendidikan formal, tetapi dapat menghambat inovasi pembelajaran yang memerlukan keleluasaan guru profesional. Sebaliknya, budaya organik memungkinkan lebih banyak inovasi dan adaptasi, tetapi tanpa koordinasi yang memadai dapat menimbulkan inkonsistensi layanan antara guru dan siswa. Banyak pakar manajemen pendidikan menyatakan bahwa sekolah efektif memadukan elemen birokratis pada aspek administratif dengan elemen organik pada aspek pedagogis, bukan memilih salah satunya secara eksklusif (Nulhaq dkk., 2026; Mintzberg, 1979).

Secara normatif, Pasal 10 UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menetapkan bahwa profesionalisme guru mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi tersebut seharusnya didukung iklim kerja yang kondusif, bukan dibebani redundansi pelaporan birokratis yang bertentangan dengan nilai keadilan dan efisiensi pelayanan publik. Guru profesional tidak hanya menguasai materi, tetapi juga memiliki keterampilan pedagogik yang efektif, etika kerja yang kuat, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi serta tuntutan pendidikan modern. Guru dengan profesionalisme tinggi dapat menciptakan pembelajaran yang lebih inovatif, kreatif, dan efektif, sehingga keberhasilan sistem pendidikan sangat bergantung pada mereka (Bali Sastrawan, 2016; Republik Indonesia, 2005).

Urgensi kajian ini tampak pertama-tama dari capaian pembelajaran. Hasil PISA 2022 menunjukkan skor Indonesia berada pada angka 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains, jauh di bawah rata-rata negara OECD yaitu 472, 476, dan 485 (OECD, 2023). Skor tersebut juga turun dibandingkan PISA 2018, yaitu dari 379 ke 366 pada matematika, 371 ke 359 pada membaca, dan 396 ke 383 pada sains (OECD, 2019, 2023). Penurunan sekitar 12 hingga 13 poin di ketiga bidang ini menunjukkan bahwa mutu pembelajaran belum membaik, sehingga waktu dan energi guru untuk proses pedagogik perlu dilindungi. Di sisi lain, data internasional menegaskan bahwa tugas administratif merupakan komponen nyata dari waktu kerja guru. Survei TALIS 2018 mencatat bahwa guru di negara-negara OECD rata-rata mengalokasikan sekitar 7% waktu kerjanya untuk tugas administratif umum, dan beban ini kerap dilaporkan sebagai salah satu sumber stres utama (OECD, 2019).

Di Indonesia, beban tersebut diperberat oleh banyaknya aplikasi dan instrumen pelaporan yang harus diisi secara berkala, seperti e-Kinerja, Dapodik, platform Merdeka Mengajar, dan laporan pertanggungjawaban operasional. Survei terhadap guru pengguna Platform Merdeka Mengajar menunjukkan bahwa sebagian besar responden (79,1%) merasa platform tersebut menambah beban administrasi mereka, dan sebagian besar guru memakai biaya pribadi untuk internet (71,1%) dan listrik (67,3%) (Haeri & Afriansyah, 2024). Pada

guru SMK, rerata beban kerja mencapai 56,02 jam per minggu, lebih tinggi daripada yang ditetapkan pemerintah (Kamdi, 2014). Persoalan ini diakui di tingkat kebijakan. Presiden pada 2020 menyatakan bahwa guru lebih banyak terpakai untuk urusan administrasi ketimbang kegiatan belajar-mengajar (Sekretariat Negara, 2020), dan Mendikdasmen pada November 2025 menjanjikan pengurangan tugas administrasi guru (Bisnis.com, 2025). Studi terdahulu juga menunjukkan bahwa kompleksitas birokrasi dan tingginya beban administratif menjadi pemicu stres kerja yang menurunkan kinerja guru dan efektivitas institusi (Satria dkk., 2025; Handayani dkk., 2025). Hal ini menegaskan perlunya simplifikasi regulasi untuk menciptakan efisiensi hukum dan pelayanan publik yang lebih adaptif (Busroh dkk., 2023).

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya ruang komunikasi yang setara antara birokrat (dinas pendidikan/pemerintah) dan praktisi sekolah (guru dan kepala sekolah). Akibatnya, kebijakan administratif kerap bersifat *top-down* tanpa memahami kesenjangan infrastruktur dan kapasitas di tingkat satuan pendidikan. Kurangnya kesempatan untuk berbicara dan saling mengenal dalam kelompok memperbesar kesalahpahaman dan konflik, misalnya pada komunitas terfragmentasi yang jarang berinteraksi (Rahmawati, 2025). Pola komunikasi kepemimpinan *top-down*, ketika pemimpin memberi instruksi dan tim mengikuti, dinilai lambat dan kurang fleksibel di tengah perubahan yang cepat (Putrianti, 2026). Model ini efektif untuk menyampaikan visi strategis dan arah kebijakan, tetapi terbatas dalam keterlibatan dan umpan balik karena bersifat satu arah, sehingga pelaksana menjadi penerima pasif. Karena itu, komunikasi *top-down* perlu dikombinasikan dengan komunikasi *bottom-up* atau dialogik untuk menciptakan aliran informasi dua arah yang kolaboratif pada fase implementasi perubahan (Jatmiko, 2026).

Secara teoretik, terjebaknya institusi pendidikan dalam birokratisasi berlebihan mencerminkan fenomena *goal displacement* dalam teori organisasi, ketika prosedur formal (sarana) menggeser tujuan utama organisasi, yaitu mutu pembelajaran (Merton, 1940; Weber, 1947). Efektivitas peningkatan mutu memerlukan pelibatan aktif pemangku kepentingan melalui komunikasi dua arah, yang belum terintegrasi optimal dalam desain tata kelola administrasi pendidikan saat ini. Birokratisasi mengarah pada resimentasi di berbagai bidang kehidupan sosial, dan birokrasi berubah mengikuti kepentingan serta orientasi kekuasaan (Hermawan, 2025). Dalam konteks ini, beban pelaporan yang berulang juga bertentangan dengan upaya penguatan profesionalisme guru sebagaimana diamanatkan UU No. 14 Tahun 2005 (Republik Indonesia, 2005).

Oleh karena itu, diperlukan terobosan transformatif melalui dialog partisipatif sebagai langkah dekonstruksi beban administratif guna mengembalikan fokus guru pada akselerasi mutu pendidikan. Metode dialog partisipatif mendorong peserta berpikir kritis, kreatif, mandiri, dan terampil berkomunikasi, dan dapat diterapkan melalui diskusi kelompok, wawancara, dramatisasi, dinamika kelompok, serta berbagi pengalaman (Mahendika dkk., 2023). Landasan filosofisnya adalah pandangan Freire (1970) bahwa dialog setara antara pihak-pihak yang terlibat merupakan prasyarat perubahan yang bermakna. Dalam konteks pemberdayaan, tantangan struktural ini perlu diatasi melalui komunikasi partisipatif berbasis dialog dan aksi kolaboratif untuk memperkuat keterlibatan pemangku kepentingan (Darmasetiadi & Swaradesy, 2026).

Meskipun banyak literatur membahas dampak negatif beban administratif terhadap guru dan pentingnya reformasi birokrasi, masih sedikit riset yang menawarkan model konseptual dialog partisipatif sebagai instrumen epistemologis dan sosiologis untuk mendekonstruksi tumpukan beban administratif tersebut secara kolaboratif (Darmasetiadi & Swaradesy, 2026; Freire, 1970). Kebaruan gagasan ini terletak pada kerangka "Dekonstruksi

Partisipatif", yaitu model integratif yang memadukan prinsip komunikasi dialogis Freirean dengan tata kelola administrasi modern, guna mengubah format pelaporan kaku menjadi instrumen pemberdayaan yang berorientasi langsung pada mutu pembelajaran peserta didik. Kajian ini mendesak dilakukan agar siklus kelelahan birokratis (*burnout*) di kalangan pendidik dapat dihentikan. Jika dibiarkan, kondisi ini berisiko menurunkan kualitas pembelajaran nasional secara sistemik dan menghambat pencapaian visi pembangunan SDM unggul. Secara umum, kajian ini bertujuan menganalisis bagaimana model dialog partisipatif dapat diimplementasikan sebagai strategi dekonstruksi beban administratif guna membangun mutu pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research)*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik dialog partisipatif sebagai dekonstruksi beban administratif demi membangun mutu pendidikan. *Library research* merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber pustaka sebagai data utama untuk memperoleh pemahaman konseptual, mengidentifikasi perkembangan teori, serta merumuskan sintesis terhadap suatu fenomena ilmiah tanpa melakukan pegumpulan data lapangan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk membangun kerangka konseptual dan sintesis teoritis berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Studi kepustakaan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholders*), tata kelola birokrasi pendidikan, efisiensi beban administratif guru dan tenaga kependidikan, serta strategi peningkatan mutu pendidikan. Dengan pendekatan ini, penelitian berfokus pada interpretasi makna, hubungan antarkonsep, serta perkembangan wacana akademik yang muncul dalam berbagai literatur.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah bereputasi, buku akademik, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen kebijakan pendidikan resmi yang membahas reformasi birokrasi sekolah, beban kerja administratif pendidik, dan model komunikasi partisipatif. Literatur yang digunakan dipilih berdasarkan relevansi tema, kredibilitas sumber, dan keterbaruan publikasi untuk memastikan data yang dianalisis sesuai dengan dinamika kebijakan pendidikan kontemporer. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai basis data akademik, baik nasional maupun internasional, sehingga diperoleh informasi yang komprehensif mengenai urgensi dialog partisipatif dalam mereduksi hambatan birokrasi pendidikan.

Teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi. Analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai konsep serta temuan penelitian yang terdapat dalam sumber-sumber literatur. Proses analisis diawali dengan reduksi data melalui pemilahan informasi yang relevan dengan fokus penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dalam bentuk tema-tema utama, seperti komunikasi partisipatif, simplifikasi administrasi pendidikan, otonomi profesional guru, budaya kolaboratif sekolah, dan indikator akselerasi mutu pembelajaran. Tahap akhir dilakukan melalui penarikan kesimpulan untuk menemukan pola hubungan antara pelibatan dialog partisipatif dan efektivitas dekonstruksi beban administratif guna mendongkrak kualitas pendidikan.

Melalui studi kepustakaan ini, penelitian berupaya membangun sintesis konseptual yang dapat menjelaskan bagaimana dialog partisipatif mampu menjadi instrumen strategis

dalam mendekonstruksi kompleksitas administratif di satuan pendidikan. Analisis tidak hanya difokuskan pada aspek mekanis pengurangan tumpang tindih pelaporan, tetapi juga pada pengembalian esensi peran pendidik pada tugas-tugas inti pembelajaran. Dengan demikian, penelitian ini menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai model tata kelola sekolah yang demokratis, efisien, dan berorientasi penuh pada pencapaian mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik validasi melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan berbagai temuan yang berasal dari artikel ilmiah, buku, laporan penelitian, dan regulasi kebijakan pendidikan sehingga diperoleh informasi yang konsisten dan saling menguatkan. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan mengkaji fenomena yang sama menggunakan berbagai perspektif teori manajemen partisipatif, sirkulasi birokrasi, dan efektivitas organisasi pendidikan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap kredibilitas sumber, tahun publikasi, serta relevansi substansi literatur yang digunakan. Langkah tersebut bertujuan untuk meningkatkan validitas, reliabilitas, dan objektivitas hasil penelitian sehingga temuan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Realitas Beban Administratif dan Dampaknya pada Pendidik

Pendidik idealnya mencurahkan segenap kapasitas intelektual dan waktunya untuk merancang strategi pembelajaran yang interaktif, membimbing peserta didik secara personal, serta melakukan evaluasi formatif yang bermakna. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pergeseran fokus yang signifikan, di mana guru terjebak dalam pusaran administrasi pelaporan yang padat. Ketika instrumen dokumentasi dirumuskan tanpa melibatkan pertimbangan praktis dari ruang kelas, birokrasi tersebut berubah menjadi beban operasional yang merusak efisiensi kerja. Beban kognitif yang berlebihan ini memicu kelelahan kerja (*burnout*) pada pendidik, yang pada gilirannya menggerus waktu esensial mengajar dan menurunkan kualitas substansial dari proses pembelajaran itu sendiri. Realitas pendidik saat ini menghadapi banyak tantangan, baik dari sumber daya internal maupun eksternal, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang merupakan bagian dari beban administratif. Beban administratif merupakan segala macam bentuk kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat dalam hal pendidikan (Sarifudin & Sijabat, 2023).

Selain kelelahan kerja (*burnout*), beban administratif juga dijadikan sebuah faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat kepuasan kerja guru. Dalam beberapa tahun terakhir, tugas guru telah berkembang dari hanya mengajar. Selain itu, mereka harus menyelesaikan berbagai tugas administratif, seperti mengisi laporan pembelajaran, memasukkan data, menyusun dokumen untuk akreditasi, dan melaporkan hasil asesmen siswa. Guru sering memusatkan perhatian mereka dari tugas utama mereka: mengajar dan membimbing siswa. Tugas administratif dapat dianggap terlalu banyak dan tidak relevan dengan kegiatan mengajar membuat orang jenuh dan frustrasi. Guru percaya bahwa waktu dan tenaga mereka tidak digunakan dengan baik untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa peningkatan beban administratif menumpuk erat dengan tingkat kepuasan kerja guru yang lebih rendah. Oleh karena itu, penting bagi kepentingan pemangku kepentingan untuk memeriksa sejauh mana beban administratif membebani guru dan bagaimana beban tersebut mempengaruhi persepsi mereka tentang pekerjaan mereka (Alief dkk., 2025).

Beberapa faktor yang mengakibatkan guru merasa terbebani dengan administrasi yang ada, antara lain:

a. Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan Guru

Guru harus membuat administrasi yang sederhana namun bermakna. Karena kurangnya pemahaman dan keterampilan untuk merancang pembelajaran tersebut, guru menghadapi kesulitan dan bahkan stres.

b. Manajemen Waktu

Guru menghadapi kesulitan membagi waktu antara administrasi dan mengajar. Tanpa manajemen waktu yang baik, administrasi terbengkalai atau pembelajaran siswa terganggu.

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Implementasi kurikulum bebas memerlukan jumlah media dan fasilitas yang cukup. Banyak sekolah tidak memiliki fasilitas ini, sehingga menghalangi guru dalam menjalankan administrasi dan proses belajar mengajar (Rosyada dkk., 2024).

Dampak negatif dari beban administrasi yang tinggi tidak hanya terbatas pada kelebihan beban waktu dan sumber daya, tetapi juga mempengaruhi efisiensi operasional secara keseluruhan. Proses perizinan yang tertunda dapat membuat bisnis merasa tidak yakin, sedangkan pengelolaan data yang tidak efektif dapat menghambat pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Penggabungan yang terbatas juga dapat mengakibatkan hilangnya informasi penting,sementara komunikasi internal yang tidak efektif dapat menghambat kerja tim dan mencapai tujuan bersama. Diperlukan tindakan nyata untuk memperbaiki dampak negatif ini. Strategi dapat mencakup perubahan prosedur administratif, penggunaan teknologi informasi yang lebih canggih, dan pelatihan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka. Meningkatkan akurasi data, menghemat waktu dan sumber daya, dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dapat dicapai dengan fokus pada integrasi teknologi (Simamora & Barimbing, 2024).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realitas beban administratif yang berlebihan dan tidak proporsional merupakan salah satu pemicu utama timbulnya *burnout* atau kelelahan menyeluruh pada pendidik. Beban tugas yang kompleks mulai dari penyusunan perangkat pembelajaran, asesmen berbasis karakter, hingga tingginya tuntutan administratif tambahan dari sekolah berdampak langsung pada terkurasnya energi psikologis pendidik. Temuan ini mengindikasikan bahwa tekanan administratif yang berlangsung secara berkelanjutan tanpa diimbangi dengan dukungan institusional yang memadai tidak hanya menurunkan motivasi dan keterlibatan profesional guru, tetapi juga mengganggu kualitas interaksi pedagogis di dalam kelas. Dengan demikian, penataan dan pengurangan beban administratif menjadi instrumen strategis untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif serta mencegah penurunan performa mengajar.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Widhianingtanti & Luijtelaar (2022) yang menempatkan keterkurasan emosional (*emotional exhaustion*), sinisme atau depersonalisasi (*cynicism/depersonalization*), serta penurunan efikasi profesional (*reduced professional efficacy*) sebagai dimensi utama sindrom *burnout* akibat stres kronis di tempat kerja yang belum dikelola dengan sukses, di mana beban kerja pendidik saat ini diperparah oleh tuntutan administratif digital yang intensif. Tekanan kerja dan produktivitas tersebut turut dipengaruhi oleh konsep tata kelola pendidikan kontemporer yang dikaji oleh Karyati & Jannah (2026), di mana manajemen sekolah yang efektif, transparansi pelaporan, serta integrasi platform digital menuntut adaptasi tinggi agar kinerja guru tetap optimal di tengah kompleksitas kelembagaan. Untuk menghadapi tekanan tersebut, kajian Evelyn Airin et al., (2025) menekankan pentingnya efikasi diri sebagai keyakinan individu dalam

mengorganisasi tindakan untuk mencapai tujuan, yang berfungsi sebagai sumber daya personal krusial guna meredam stres kerja, mencegah *burnout*, serta memperkuat ketahanan mental pendidik secara adaptif.

Dialog Partisipatif sebagai Instrumen Dekonstruksi Birokrasi

Sebagai respons atas kebuntuan struktural tersebut, pendekatan komunikasi dua arah melalui dialog partisipatif menawarkan solusi transformatif. Pendekatan ini meruntuhkan batasan hierarki kaku dengan mengubah posisi pendidik dari sekadar objek penerima kebijakan menjadi mitra strategis (*co-creator*) dalam tata kelola institusi. Melalui ruang diskusi yang terbuka, transparan, dan terjadwal antara pengambil kebijakan sekolah dan para pendidik, alur kerja administratif dapat dievaluasi secara objektif. Pos-pos pelaporan yang redundan, tumpang tindih, atau tidak memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan pembelajaran akan dipangkas melalui proses dekonstruksi, menghasilkan tata kelola administrasi yang lebih ramping, efektif, dan ramah guru.

Dialog adalah cara terbaik untuk melakukan komunikasi partisipatif. Penghormatan dan pengakuan terhadap pembicara lain adalah inti dari sebuah dialog. Setiap pembicara adalah individu yang mandiri, bukan objek komunikasi, dan memiliki hak yang sama untuk berbicara dan mendengarkan, dengan harapan suara mereka tidak dihalangi atau dipadukan dengan suara hati. Dalam pembangunan, kolaborasi adalah proses kerjasama dan interaksi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dalam komunikasi partisipatif, kolaborasi fokus pada dialog yang terbuka dan berbasis kesetaraan daripada hubungan hierarkis atau instruktif (Nengsi & Basri, 2026).

Pada dasarnya, strategi komunikasi partisipatif menuntut transformasi dari paradigma komunikasi instruktif menjadi paradigma dialogis. Menurut model konvergensi Kincaid, komunikasi yang efektif terjadi ketika ada pemahaman yang sama antara komunikator dan komunikan. Selain itu, komunikasi partisipatif bekerja dengan baik ketika media yang digunakan sesuai dengan budaya dan kebiasaan lokal. WhatsApp yang sudah digunakan oleh banyak orang dapat diubah menjadi kanal interaktif daripada hanya berbagi instruksi. Dengan menggunakan fitur polling, peta partisipatif, dan forum diskusi virtual, dapat menyampaikan aspirasi sekaligus melacak kemajuan. Sebaliknya, forum tatap muka, seperti pertemuan dan rapat kerja, harus menjadi tempat para pendidik bekerja sama untuk membuat solusi untuk kebutuhan sehari-hari. Komunikasi *hybrid* yang dihasilkan dari kombinasi saluran digital dan tatap muka ini dapat menjangkau semua lapisan sosial, termasuk lapisan yang selama ini termarginalisasi dalam komunikasi *top-down* (Isa dkk., 2025).

Proses dekonstruksi yang berjalan terus-menerus tanpa henti, selalu ada rekonstruksi terhadap hirarki oposisi biner. Fungsi dekonstruksi adalah untuk menemukan atau mempertimbangkan perbedaan selain hirarki oposisi biner dan hirarki metafisik yang sudah menjadi konvensi dan mungkin telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Selanjutnya, hasilnya akan membentuk struktur hirarki metafisik baru, yang mungkin membalikkan struktur hirarki metafisik saat ini (Altiria, 2023). Birokrasi pendidikan dibuat untuk memastikan bahwa organisasi berjalan lancar, ada orang yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, dan bahwa standar kualitasnya sama. Tujuan ini sering terdistorsi di lapangan. Birokrasi berkembang rangkaian menjadi prosedur yang saling berhubungan tetapi tidak terstruktur (Mahfud dkk., 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog partisipatif melalui pelibatan aktif pendidik, komunikasi dua arah yang terbuka, serta penyesuaian peran berdasarkan

kapasitas individu merupakan instrumen strategis dalam mendegradasi birokrasi dan beban administratif yang kaku di lingkungan lembaga pendidikan. Proses dialogis yang dibangun secara konsisten mulai dari perencanaan program hingga evaluasi kerja, mampu menempatkan pendidik sebagai subjek utama yang memiliki ruang untuk menyuarakan gagasan, bukan sekadar objek penerima instruksi birokratis. Temuan ini mengindikasikan bahwa komunikasi partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai sarana koordinasi teknis, tetapi juga sebagai media pemberdayaan untuk menciptakan ekosistem kerja yang humanis, inklusif, dan bebas dari tekanan struktural yang berlebihan. Dengan demikian, dialog partisipatif menjadi landasan krusial dalam mendekonstruksi birokrasi demi akselerasi mutu pendidikan yang berkelanjutan.

Temuan tersebut sejalan dengan teori Darmasetiadi & Swadesy (2026) mengenai komunikasi partisipatif dalam tradisi sosial budaya, yang menekankan bahwa komunikasi bukan sekadar penyampaian pesan satu arah, melainkan proses sosial inklusif yang menempatkan anggota sebagai subjek utama yang memiliki hak bersuara untuk meruntuhkan sekat-sekat birokrasi yang kaku, serta Simamora et al. (2025) terkait penerapan konsep tersebut pada pembangunan di Indonesia, dimana distribusi kekuasaan dan informasi yang merata melalui pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) menjadi kunci utama tata kelola yang efektif. Melalui penggabungan kedua perspektif tersebut, pelibatan aktif dan dialog setara terbukti mampu meminimalisasi resistensi terhadap aturan baru, memperkuat rasa memiliki (*sense of belonging*), serta memastikan bahwa setiap kebijakan institusional benar-benar mencerminkan kebutuhan riil para pendidik di lapangan.

Akselerasi Mutu Pendidikan Berkelanjutan Melalui Tata Kelola Kolaboratif

Peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dicapai secara instan melalui paksaan struktural atau regulasi searah, melainkan membutuhkan ekosistem organisasi yang adaptif. Ketika aspirasi pendidik diakomodasi secara nyata melalui dialog partisipatif, terbangunlah sebuah budaya organisasi sekolah yang kolaboratif. Kebijakan operasional yang lahir dari ruang musyawarah menumbuhkan rasa kepemilikan bersama (*sense of belonging*) dan tanggung jawab kolektif di kalangan pendidik. Kondisi psikologis yang kondusif ini memicu peningkatan motivasi kerja, komitmen profesional, dan kreativitas pedagogis, sehingga akselerasi mutu pendidikan baik dari aspek proses maupun hasil, dapat tercapai secara konsisten dan berkesinambungan.

Mutu pendidikan termasuk salah satu indikator penting dalam menentukan kemajuan suatu negara karena kualitas sumber daya manusia secara langsung berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Pendidikan yang baik dapat menghasilkan orang yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki keterampilan sosial, emosional, dan intelektual yang diperlukan (Setiawan dkk., 2024). *Continuous improvement* merupakan konsep tentang perbaikan atau peningkatan diri secara terus-menerus yang mendapatkan perhatian penuh, karena hal ini telah menjadi bagian dari karakteristik persaingan global agar berhasil memajukan produksi barang, layanan jasa dan kualitas proses dalam perusahaan. Perbaikan mutu tidak sukses begitu saja, tapi distrategikan secara sesistematis mungkin fase demi fase, supaya suatu keorganisasian mampu melakukan sebuah perbaikan besar, berkesinambungan, sehingga organisasi harus terstruktur dengan tepat (Rusdi, 2018).

Kaizen, yang berarti perbaikan berkelanjutan, menitikberatkan pada proses yang dilakukan secara bertahap namun konsisten untuk mencapai hasil yang optimal. Prinsip ini relevan dalam konteks manajemen mutu pendidikan karena mendorong pendekatan proaktif dalam menciptakan perubahan kecil yang berdampak besar. Fokus utama Kaizen adalah menghilangkan pemborosan (muda), meningkatkan efisiensi, dan menjaga

kesinambungan perbaikan. Dalam pendidikan, prinsip ini tidak hanya terbatas pada pengelolaan teknis, tetapi juga pada pembentukan budaya mutu yang mencakup semua elemen organisasi, mulai dari tenaga pendidik, siswa, hingga manajemen sekolah (Latif & Sesmiarni, 2024).

Upaya meraih kesuksesan dalam melaksanakan perbaikan mutu berkelanjutan sangat diperlukan suatu langkah yang jelas dan sistematis oleh setiap madrasah. Langkah-langkah peningkatan kualitas berkelanjutan adalah merencanakan, mengimplementasikan rencana, meninjau hasil implementasi rencana, dan memperbaiki hasil yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan mutu berkelanjutan memerlukan beberapa langkah yang efektif dan efisien oleh madrasah dalam meningkatkan mutu proses dan mutu lulusannya (Marzal, 2022).

Kebijakan dan masalah publik adalah pusat tata kelola kolaboratif. Fokus pada masalah publik yang membedakan tata kelola kolaboratif dari bentuk pengambilan keputusan konteks lainnya, seperti mediasi transformatif atau penyelesaian alternatif. Inovasi yang dilakukan secara kolaboratif di sektor publik adalah bagian dari arena interaksi kelembagaan, yang dapat dianggap sebagai jaringan tata kelola. Pola interaksi dan tindakan para aktor yang dibentuk oleh aturan, standar, dan rutinitas yang diberikan oleh arena-arena ini; model tata kelola yang dipilih dapat diubah (Nurhayati & Rahman, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tata kelola kolaboratif melalui keterlibatan aktif kepala sekolah, staf, dan dewan guru dalam perumusan program kerja serta pemanfaatan sistem informasi manajemen merupakan fondasi utama dalam mendorong akselerasi mutu pendidikan. Perencanaan program yang disusun secara partisipatif dan terarah menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan, pembagian tugas sesuai fungsi, serta penciptaan budaya mutu di lingkungan lembaga pendidikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa tata kelola kolaboratif tidak hanya berfungsi sebagai pengatur administratif, tetapi juga sebagai penggerak perubahan yang mampu membangun kesamaan komitmen seluruh warga sekolah terhadap pencapaian tujuan dan kepuasan pemangku kepentingan. Dengan demikian, tata kelola kolaboratif menjadi instrumen strategis untuk menciptakan organisasi yang adaptif terhadap dinamika perubahan dunia pendidikan di era modern.

Temuan tersebut sejalan dengan teori *Total Quality Management* (TQM) yang merujuk pada pandangan Mahdhuroh et al. (2026) menekankan bahwa mutu pendidikan bukan sekadar hasil akhir, melainkan proses perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement/Kaizen*) dan keterlibatan total seluruh elemen organisasi demi kepuasan pemangku kepentingan, sehingga birokrasi yang kaku dan berlebihan dapat direstrukturisasi agar fokus pendidik kembali pada substansi kualitas pembelajaran. Pendekatan ini perlu diintegrasikan dengan perspektif tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) sebagaimana dikembangkan oleh Ansell & Gash serta didukung oleh Satria, Suranto, & Sulaksono (2025), yang menyatakan bahwa pemecahan masalah struktural seperti tumpang tindih beban administratif tidak dapat diselesaikan secara sepihak (top-down), melainkan memerlukan sinergi, dialog, dan kepercayaan bersama lintas aktor di dalam institusi. Lebih lanjut, pergeseran paradigma tersebut disempurnakan melalui teori manajemen berorientasi hasil (result-oriented governance) yang diperkuat melalui kajian tata kelola publik modern (seperti Rosita, 2024; Pandowo et al.; serta literatur terkini RISOMA, 2025/2026) menggeser paradigma pengelolaan dari kepatuhan aturan yang kaku (*rule-driven*) menuju fleksibilitas manajerial dan pencapaian keluaran substantif, sehingga energi institusi pendidikan dapat terserap secara optimal pada peningkatan capaian mutu pembelajaran nyata daripada sekadar formalitas dokumen administratif.

KESIMPULAN

Tata kelola pendidikan saat ini menghadapi tantangan serius akibat dominasi birokrasi dan beban administratif yang kaku. Kondisi tersebut menyita waktu efektif guru, memicu *goal displacement*, dan menyebabkan kelelahan kerja (*burnout*). Guru terbebani tuntutan pelaporan yang tumpang tindih sehingga energi profesionalnya tidak lagi tercurah pada proses pembelajaran. Solusi atas kebuntuan struktural ini memerlukan dialog partisipatif dan tata kelola kolaboratif yang meruntuhkan sekat hierarki satu arah (*top-down*), menempatkan pendidik sebagai mitra strategis (*co-creator*), serta mengembalikan fokus institusi pada akselerasi mutu pembelajaran berkelanjutan melalui prinsip Kaizen.

Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan peningkatan mutu pendidikan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh ketatnya kepatuhan administratif (*administrative compliance*), tetapi sangat dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi dua arah dan fleksibilitas manajerial dalam mengelola perilaku organisasi. Dialog yang setara juga memperkuat otonomi profesional dan budaya kolaboratif sekolah. Kebijakan administrasi pun lebih sederhana, relevan, dan benar-benar menjawab kebutuhan pendidik di lapangan. Karena itu, penelitian selanjutnya direkomendasikan menggunakan pendekatan empiris atau *action research* untuk menguji penerapan nyata model dialog partisipatif di berbagai satuan pendidikan, sekaligus merancang prototipe sistem integrasi administrasi digital berbasis *bottom-up* yang ramah guru. Dengan demikian, dekonstruksi birokrasi dapat menjadi panduan operasional yang aplikatif guna mewujudkan sumber daya manusia berkualitas serta tata kelola pendidikan yang efisien dan berdaya saing tinggi.

REFERENSI

Alief, L., Matiala, T. F., Mamonto, T., Mokodompit, H., Putrianti, F. G., & Sihombing, D. A. (2025). Analisis Pengaruh Burnout, Beban Administratif dan Work-Life Balance Terhadap Kepuasan Kerja Guru: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, *4*(1), 1116–1121. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1696

Altiria, S. (2023). DEKONSTRUKSI DERRIDA PADA KAJIAN LINGUISTIK KOGNITIF. *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)*, *21*(21), 270–280. https://doi.org/10.25170/kolita.21.4857

Asrohah, H. (2024). *Manajemen Mutu Pendidikan: Teori dan Implementasinya pada Satuan Pendidikan*. Academia Publication.

Bali Sastrawan, K. (2016). PROFESIONALISME GURU DALAM UPAYA MENINGKATKAN MUTU PEMBELAJARAN. *Jurnal Penjaminan Mutu*, *2*(2), 65. https://doi.org/10.25078/jpm.v2i2.73

Hermawan, R. (2025). *Birokrasi*. Penerbit Adab.

Isa, J., Johana, K., & Nurmala. (2025). Strategi Komunikasi Partisipatif untuk Meningkatkan Kesadaran Lingkungan di Kampung Dadap Sawah. *CoverAge*, *16*(1).

Jatmiko, R. D. (2026). *MANAJEMEN PERUBAHAN (CHANGE MANAGEMENT)*. UMMPress.

Latif, H., & Sesmiarni, Z. (2024). KONSEP KAIZEN DALAM MANAJEMEN MUTU PENDIDIKAN ISLAM. *jurnal pendidikan islam*, *20*(2).

Mahendika, D., Hasnah, S., & Aina, M. (2023). *Pengantar Pendidikan Karakter*. Sulur Pustaka.

Mahfud, M., Zaeni, A., & Hadi, A. (2026). Dekonstruksi Birokrasi Pendidikan: Implementasi Filosofi "Gitu Aja Kok Repot" Gus Dur dalam Transformasi Digital Pembelajaran dari Madrasah hingga Perguruan Tinggi. *AT-TAKLIM : Jurnal Pendidikan Multidisiplin*, *3*(7).

Marzal. (2022). PERENCANAAN PERBAIKAN MUTU BERKELANJUTAN MADRASAH UNGGUL DI KOTA PALEMBANG. *Jurnal Perspektif*, *15*(2).

Nengsi, N., & Basri, E. (2026). KOMUNIKASI PARTISIPATIF MASYARAKAT DALAM

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA POMBEYOHA KECAMATAN LADONGI KABUPATEN KOLAKA TIMUR. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidi*, *4*(1).

Nulhaq, S., Madhakomala, R., & Masduki. (2026). *Membangun Layanan Profesional Guru: Sinergi Budaya Organisasi dan Employee Engagement dengan Kepemimpinan Transformasional sebagai Katalis*. Sigufi Artha Nusantara.

Nurhayati, N., & Rahman, A. (2023). SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: TATA KELOLA KOLABORATIF DALAM SEKTOR PUBLIK. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi*, *11*(1), 1–22. https://doi.org/10.34010/agregasi.v11i1.9207

Putrianti, F. G., & dkk. (2026). *Kepemimpinan dalam Manajemen*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Rahmawati, A. (2025). *PENDIDIKAN DISABILITAS MULTIKULTURAL BERBASIS DIGITAL HUMANISM*. Greenbook Publisher.

Rosyada, A., Syahada, P., & Chanifudin, C. (2024). Kurikulum Merdeka: Dampak Peningkatan Beban Administrasi Guru terhadap Efektivitas Pembelajaran. *Jurnal Inovasi, Evaluasi dan Pengembangan Pembelajaran (JIEPP)*, *4*(2), 238–244. https://doi.org/10.54371/jiepp.v4i2.491

Rusdi, R. (2018). CONTINUES IMPROVEMENT SEBAGAI UPAYA DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN PEDESAAN. *AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM*, *2*(2), 150–160. https://doi.org/10.33650/al-tanzim.v2i2.396

Sarifudin, F., & Sijabat, T. A. P. (2023). Analisis Beban Administrasi Terhadap Pelayanan Publik pada Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah. *Idarotuna : Journal of Administrative Science*, *4*(2), 166–177. https://doi.org/10.54471/idarotuna.v4i2.74

Setiawan, M. B. A., R, A. H. A., Rizal, M. S., & Abdussyakir Z, M. (2024). Peran Pemimpin dalam Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, *17*(2), 139–150. https://doi.org/10.54471/tarbiyatuna.v17i2.3437

Simamora, O. J., & Barimbing, I. R. (2024). *Optimasi Beban Administrasi Dilingkungan Diskumperindag Kabupaten Semarang: Tinjuan Mendalam Terhadap Efesiensi Operasional*. https://doi.org/10.5281/ZENODO.12800638

Bisnis.com. (2025, 25 November). *Mendikdasmen Mu'ti janjikan beban administrasi guru dikurangi*. https://kabar24.bisnis.com/read/20251125/79/1931657/mendikdasmen-muti-janjikan-beban-administrasi-guru-dikurangi

Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. Herder and Herder.

Haeri, & Afriansyah. (2024). Eksplorasi beban digital guru: Survei pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar (PMM) oleh guru. *Aspirasi*. https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/4615

Kamdi, W. (2014). Kinerja guru SMK: Analisis beban kerja dan karakteristik pembelajaran. *Jurnal Teknologi dan Kejuruan*. https://journal.um.ac.id/index.php/teknologi-kejuruan/article/download/4084/720

Merton, R. K. (1940). Bureaucratic structure and personality. *Social Forces, 18*(4), 560–568.

Mintzberg, H. (1979). *The Structuring of Organizations*. Prentice-Hall.

OECD. (2019). *TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners*. OECD Publishing.

OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I): The State of Learning and Equity in Education*. OECD Publishing.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*.
Sekretariat Negara RI. (2020, 3 April). *Presiden: Beban administratif membuat guru tak fokus kegiatan belajar-mengajar*. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_beban_administratif_membuat_guru_tak_fokus_kegiatan_belajar_mengajar
Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. Free Press.

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA